ISSN No. 2088-2815
No. 7, Tahun 2014

GOVERNANCE

Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat

1. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi). Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
2. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. Oleh : Mordekai Pinatik
4. KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA POOPO KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh : HIZKIA SARAYAR
5. PERANANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh : JELLY MAMANGKEY
6. PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU. Oleh : Reonald Steven Maabuat
7. KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA. Oleh : MAIKEL YIGIBALOM
8. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA. Oleh : Timothy Gabriel Baptis Lumapow
9. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG. Oleh : FRENNY RUMUAT
10. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI. Oleh : RENALTO TUMARAH
11. EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. Oleh : LIDYA CHRISTINE MONTUNG
12. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN RERE-WOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA. Oleh : JULIO ARUPERES
13. Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Oleh : INDRA MEREV WAANI
14. PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DIKANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT). Oleh : Jimmy Langkay
15. KEPEMIMPINAN CAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Oleh : ZULFIHKRAM HARAS.
16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN (E.KTP) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kantor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua). Oleh : YUSTINUS SAPARI

9 772088 281985

GOVERNANCE
NO. 7 TAHUN III, 2014

Pelindung
DEKAN FISIP UNSRAT
Drs. Philep Regar, MSi

Penanggung Jawab
Dra Marlien Lapian MSi

Pemimpin Redaksi
DR. Michael Mementu, MA

Sekretaris Redaksi
Neni Kumayas, SIP, MA

Dewan Redaksi
Drs Burhan Niode MA
DR. Daud M. Liando, S.Sos, MSi
Donald Monintja, S.Sos, MSi
Neni Kumayas, SIP, MA
Dra. Daisy Posumah, MIA
Drs Johnly Pangemanan, MSi

Sekretariat :
Alfons Kimbal S.Sos, MSi
Trintje Lambey, SIP, MSi

Lay Out & Sirkulasi
Ardiles Mewoh SIP, MSi
Maxi Egetan SIP, MSi
Frangky Rengkung, SIP

Alamat
Jl. Kampus Bahu 95115
Telp. 0431-862586
Email. governance.unsrat@gmail.com

1. BUDAYA POLITIK DI INDONESIA (suatu telaah tentang perkembangan budaya politik partisipan sejak kemerdekaan sampai dengan era reformasi). Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
2. PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN. Oleh: T. A. M. Ronny Gosal
3. PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI KECAMATAN TALAWAAN KABUPATEN MINAHASA UTARA. Oleh : Mordekai Pinatik
4. KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PENYERAP ASPIRASI MASYARAKAT DIDESA POOPO KECAMATAN RANOIAPO KABUPATEN MINAHASA SELATAN. Oleh : HIZKIA SARAYAR
5. PERANANAN KEPEMIMPINAN HUKUM TUA DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DESA DI DESA PAKUURE KINAMANG KECAMATAN TENGA KABUPATEN MINAHASA SELATAN . Oleh : JELLY MAMANGKEY
6. PERILAKU BIROKRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DINAS TATA KOTA KOTAMUBAGU. Oleh : Reonald Steven Maabuat
7. KONFLIK PENEMPATAN PEMIMPIN DI DINAS PENDIDIKAN DAN DINAS SOSIAL DI KABUPATEN LANNY JAYA. Oleh : MAIKEL YIGIBALOM
8. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA APARATUR KELURAHAN TINGKULU KECAMATAN WANEA. Oleh : Timothy Gabriel Baptis Lumapow
9. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DI KELURAHAN KAKENTURAN DUA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG. Oleh : FRENNY RUMUAT
10. IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI. Oleh : RENALTO TUMARAH
11. EFEKTIFITAS PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG KEPENDUDUKAN (STUDI TENTANG PELAYANAN PEMBUATAN KTP DI KELURAHAN MANEMBO-NEMBO ATAS, KECAMATAN MATUARI, KOTA BITUNG. Oleh : LIDYA CHRISTINE MONTUNG
12. PERAN MASYARAKAT DALAM MENGAWASI KINERJA PERANGKAT KELURAHAN REREWOKAN KECAMATAN TONDANO BARAT KABUPATEN MINAHASA. Oleh : JULIO ARUPERES
13. Kinerja Birokrasi Pemerintah Desa Dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik. Oleh : INDRA MEREV WAANI
14. PERAN KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN KERJA PEGAWAI (STUDI KASUS DIKANTOR KECAMATAN AMURANG BARAT). Oleh : Jimmy Langkay
15. KEPEMIMPINAN CAMAT TAHUNA TIMUR DALAM MENINGKATKAN PERANSERTA MASYARAKAT UNTUK MENUNJANG KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE. Oleh : ZULFIHKRAM HARAS,
16. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN (E.KTP) DI DISTRIK URFAS KABUPATEN WAROPEN TAHUN 2013 (Suatu Studi di Kantor Distrik Urfas Kabupaten Waropen Provinsi Papua). Oleh : YUSTINUS SAPARI

9 772088 281065

Pengantar Redaksi

Kali ini Jurnal Ilmiah Governance tampil dengan tulisan yang melibatkan mahasiswa yang telah menyelesaikan penulisan studi akhir yakni Skripsi dan Tesis. Keterlibatan mahasiswa dalam rangka membuat lulusan perguruan tinggi lebih berkualitas dan menghasilkan karya tulisan yang bisa diakses oleh publik atau dipublikasikan. Mengingat juga negeri ini masih kekurangan karya ilmiah yang dipublikasikan daam bentuk buku atau jurnal, dibandingkan dengan beberapa negara yang setara dengan Indonesia. Oleh karena itu Jurnal Governance memberikan ruang kepada mahasiswa untuk menghasilkan karya yang terpublikasi.

Kesempatan kali ini jurnal governance menghasilkan karya-karya pemikiran intelektual, produk perguruan tinggi. Berbagai hal menyangkut politik pemerintahan dibahasa dalam tulisan-tulisan jurnal ini. Sekiranya semua dapat bermanfaat dalam membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Semoga pembaca mendapat manfaat dari Jurnal ini

SAMBUTAN DEKAN FISIP UNSRAT

Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan melalui undang-undang berupa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 dan ditetapkan pada tanggal 27 Maret 1989. Mengenai Dasar, Fungsi, dan Tujuan dari Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Seangkan tujuan Pendidikan Nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan , kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Semua yang tersirat dalam Dasar, Fungsi dan Tujuan Pembangunan Nasional ini adalah visi yang perlu digapai oleh institusi Universitas Sam Ratulangi, khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai bagian dari komponen utama Universitas Sam Ratulangi dalam menghasilkan manusia Indonesia seutuhnya, apalagi era globalisasi dan keberadaan Sulut strategis di pasifik sangat membutuhkan SDM yang dapat mengembangkan potensi unggulnya. Karena ini bagaimana kita melakukan cara-cara yang tepat untuk membentuk peserta didik yang berhasil guna.

Dalam rangka itu, kualitas tenaga akademiknya harus selalu diberdayakan agar dapat membina mahasiswa dengan baik. Jurnal Ilmiah Governance Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat ini adalah salah satu wadah yang tepat mengasah ketajaman sumber daya tenaga akademik di lingkungan FISIP Unsrat. Seyogyanya Jurnal ini dapat dimanfaatkan dengan baik.

Dekan,

Drs. Philep M. Regar, MSi

SAMBUTAN
KETUA JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN FISIP UNSRAT

Tradisi akademis yang baik adalah bagaimana kita mengembangkan kebiasaan berdiskusi, meneliti dan menulis. Kebiasaan ini harus berjalan terus menerus yang nantinya bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran brilian bagi kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan peningkatan kesejahteraan umat manusia.

Karena itu para akademisi di Universitas Ratulangi khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat dituntut untuk dapat berusaha selalu meningkatkan kemampuan sumber dayanya dalam menghasilkan karya-karya hasil analisanya terhadap pesoalan-persolan politik pemerintahan di sekitar kita. Media Jurnal Governance yang terbit secara berkala ini adalah wadah yang membantu para akademisi menuangkan karya-karya pikirnya dengan metode ilmiah.

Semoga segenap akademisi Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat sebagai ilmuan yang sangat diharapkan, untuk dapat menulis karya ilmiah yang produktif.

Ketua Jurusan,

Dra. Marlien Lapian, MSi

PELUANG DAN TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Oleh:
T. A. M. Ronny Gosal

Di era otonomi daerah dan pendidikan yang sekarang sedang gencar dilaksanakan oleh pemerintah pusat kini pemerintah daerah telah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu tentang pendidikan di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia. Hal itu telah tertera dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. "Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam kewenangan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, keadilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain." Pada era otonomi tersebut kualitas pendidikan akan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Ketika pemerintah daerah memiliki visi dan misi yang baik pada dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerah bersangkutan akan maju. Sebaliknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated, tidak akan pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang.

Pemberian dan berlakunya otonomi pendidikan di daerah memiliki nilai strategis bagi daerah untuk berkompetisi dalam upaya membangun dan memajukan daerah-daerah di seluruh Nusantara, terutama yang berkaitan langsung dengan sumber daya manusia dan alamnya dalam mendobrak kebekuan dan stagnasi yang dialami dan melingkupi masyarakat selama ini. Begitu juga dengan adanya desentralisasi pendidikan, pemerintah daerah baik tingkat kabupaten ataupun kota dapat memulai peranannya sebagai basis pengelolaan pendidikan dasar.

Keyword: Desentralisasi Pendidikan, Peluang, Tantangan.

Pendahuluan

Sejak beralihnya rezim kekuasaan orde baru, desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan negara, pendidikan termasuk wilayah penyelenggaraan pemerintah yang kewenangan pengelolaannya dilimpahkan kepada daerah melalui otonomi daerah. Salah satu hasil dari gelombang reformasi total ialah lahirnya dua Undang-undang yaitu mengenai otonomi dan UU mengenai Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia senantiasa menarik untuk diikuti.Diawali tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang sentralistis, reformasi tata pemerintahan akhirnya melahirkan model desentralisasi yang paling masif di dunia.Pemerintah daerah pada waktu yang bersamaan langsung menerima sebelas kewenangan wajib yang harus dilaksanakan.Mulai kewenangan bidang pendidikan hingga ketenagakerjaan. Hanya lima kewenangan yang diurusi pemerintah pusat. Yaitu, kewenangan bidang pertahanan dan keamanan, hukum dan peradilan, moneter, agama, dan hubungan luar negeri. Selebihnya, di luar sebelas kewenangan wajib dan lima kewenangan pemerintah pusat, itu dibagi habis antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Pada perkembangannya, di antara sebelas kewenangan wajib yang diserahkan pada pemerintah kabupaten/kota itu, beberapa ditarik kembali pemerintah pusat.Misalnya, kewenangan bidang pertanahan, industri, dan perdagangan serta sebagian kewenangan bidang kesehatan dan pendidikan.Instrumen hukum penarikan kembali beberapa kewenangan tersebut bervariasi. Mulai Undang-Undang sektoral, peraturan pemerintah (PP), hingga surat edaran menteri. Puncak penarikan beberapa kewenangan itu adalah revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah. Revisi tersebut kemudian melahirkan Undang-Undang Nomor 32Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat-Daerah.

Isu-isu yang relevan perlu dikaji secara cermat untuk kepentingan penelitian, penetapan kebijakan dan pendampingan, agar pelaksanaan otonomi daerah tidak lagi mengabaikan rasa keadilan rakyat di tingkat daerah. Selanjutnya, diharapkan dapat diwujudkan pemerintahan daerah yang demokratis, bernafaskan kerakyatan, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya setempat dalam mencapai 'masyarakat warga'/'masyarakat madani' yang selanjutnya tidak akan mengganggu proses integrasi

bangsa.Hasil pendidikan Indonesia selama Orde Baru adalah manusia-manusia yang dikendalikan dan sekedar menjadi pengikut-pengikut setia terhadap suatu struktur kekuasaan.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang dapat diurus oleh pemerintah daerah.Pada bidang ini, kenyataannya tidak serta-merta segala sesuatunya diurus oleh pemerintah daerah.Akan tetapi, dalam hal pengelolaan secara penuh segala sesuatunya dirancang secara bertahap seiring dengan kesiapan dan ketersediaan pemenuhan persyaratan yang dibutuhkan.Dengan demikian, otonomi daerah membawa konsekuensi logis pada otonomi pendidikan di daerah, khususnya dalam hal reorientasi visi dan misi pendidikan. Menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kenyataan yang ada, maka dalam rangka menyongsong otonomi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah dibutuhkan serangkaian inovasi. Inovasi yang dimaksud, diantaranya berupa: pengelolaan pendidikan berbasis sekolah, peran aktif masyarakat di bidang pendidikan, dan tenaga pendidik yang profesional sertapeserta didik yang berkualitas.

Pembicaraan mengenai otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari azas desentralisasi yang menjadi landasan bagi pembentukan pemerintah daerah.Desentralisasi adalah prinsip pembelahan wilayah satu negara ke wilayah-wilayah yang lebih kecil, dan diwilayah-wilayah itu dibentuk institusi politik dan institusi administrasi untuk melayani kebutuhan orang atau masyarakat disatu tempat. Hal ini penting dilakukan sebab pada dasarnya pemerintah melaksanakan tiga fungsi dasar: service, regulation, empowerment dengan maksud mengantisipasi kebutuhan masyarakat secepat, sedekat, dan setepat mungkin. Setelah kebijakan desentralisasi Pendidikan dilaksanakan, ternyata memiliki beberapa dampak bagi pemerintah daerah.Dampak yang ditimbulkan bisa berbampak positif dan berdampak negatif.

Agar dalam pembahasan ini dapat terfokus pada inti permasalahan maka penulis perlu membatasi masalah. Ada tiga permasalahan yang perlu disikapi sehubungan dengan desentraslisasi pendidikan yaitu: (1) Mengapa kebijakan desentralisasikan pendidikan diperlukan? (2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari kebijakan desentralisasi pendidikan? (3) Bagaimana cara mengatasi Permasalahan yang ditimbulkan dari desentralisasi pendidikan?

Pembahasan

Desentralisasi Pendidikan Sebagai Tuntutan Riil Masyarakat Reformasi total yang melanda kehidupan bermasyarakat dan bernegara dewasa ini telah meminta perubahan-perubahan yang mendasar di dalam segala aspek kehidupan politik, ekonomi,dan pengembangan kebudayaan. Salah satu anak kandung reformasi, adalah tuntutan otonomi daerah.Mengapa disebut "tuntutan", ini boleh jadi disebabkan pengalaman empirik bangsa yang sepanjang sejarahnya ternyata dikendalikan terpusat. Pemerintahan, sebagai salahsatu aspek pengendali itu, memang sudah berlaku tidak adil terhadap daerah. Akibatnya, ketika peluang itu jebol, tak ada wacana lain bagi daerah yang paling layak dikembangkan selain otonomi. Pemerintah agaknya, sangat paham hal ini.Ancaman disintegrasi, sesuatu yang bagai hantu, tak pelak senantiasa dicarikan jawabannya ke lembaga-lembaga pemerintah.

Dugaan yang dapat dikemukakan, tentu berkait dengan keruwetan politik di sekitar pemerintah.Sudah menjadi rahasia umum, segala simpul pertarungan politik kini, senantiasa mesti dipicu dari hal yang menjadi substansi urusan.Karena pasal otonomi daerah ini memang tidak sekadar soal pemerintahan, maka variabel politik inilah yang justru sangat mewarnai perdebatannya, tentu berkait dengan soal paling krusial, yaitu soal kewenangan. Bagi sementara pihak, ini mungkin tidak mengimplikasikan apa-apa, tetapi bila ditelusuri lebih jauh, kewenangan inilah yang menjadi bahan "rebutan" di daerah, antara provinsi dan kabupaten/kota. Dengan perubahan desain otonomi dari bertingkat menjadi berjenis, propinsi dan kabupaten atau kota akan menjadi daerah otonom yang sederajat. Pada saat yang sama, titik berat pelaksanaannya diletakkan di kabupaten/kota, karena keduanya lebih dekat ke masyarakat. Ini, lebih karena pertimbangan penekanan pada pelayanan.Hal yang abai dilakukan sepanjang sejarah Orde Baru,kemudian dimana sesuatu yang diperebutkan, tentu saja pada interes orang pusat terhadap provinsi.Meski tidak berdasar, mengingat hingga kini provinsi masih dapat dipandang memiliki kapasitas dari sisi manajemen pembangunan, hal ini tentu saja masuk akal.Apalagi untuk mengatur, mengekslorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam, dimana "orang pusat" biasanya memiliki kepentingan.

Secara sinis, sejumlah kalangan beranggapan, dengan otonomi ini, sama halnya dengan memindahkan KKN ke daerah. Apalagi nanti tumpuannya di kabupaten/kota, dimana tentu biaya siluman untuk segala urusan tentu jauh lebih murah.

Permasalahan Dalam Desentralisasi Pendidikan

Meskipun desentralisasi pendidikan bukanlah merupakan sesuatu yang mudah dilaksanakan namun demikian sejalan dengan arus demokratisasi di dalam kehidupan manusia, maka desentralisasi pendidikan akan memberikan efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan, pemerataan. Manfaat yang diperoleh daerah dari pelaksanaan otonomi daerah tentu tidak hanya dibatasi pada makin besarnya kekuasaan politik yang dimiliki pemerintah lokal dan makin besarnya pembagian kekayaan negara untuk pemerintah lokal.Salah satu keuntungan yang harusnya diperoleh adalah perbaikan kualitas pendidikan dengan adanya otonomi pendidikan.Daerah bisa lebih berkonsentrasi mengembangkan berbagai keunggulan daerahnya untuk dirumuskan dalam kebijakan pendidikannya.Sayangya, wacana tentang otonomi pendidikan atau manfaat otonomi daerah dan implikasinya terhadap pengembangan pendidikan di daerah jarang sekali mendapat perhatian publik.Pelaksanaan desentralisasi pendidikan atau disebut Otonomi Pendidikan masih belum sepenuhnya ber-

jalan sesuai dengan yang diharapkan, disebabkan karena kekurangsiapan pranata sosial, politik dan ekonomi.Dengan otonomi nampaknya tidak ada perbaikan anggaran pendidikan dan kesehatan.Hanya beberapa Kabupaten yang secara serius menggratiskan biayasekolah bagi warganya. Otonomi pendidikan akan memberi efek terhadap kurikulum, efisiensi administrasi, pendapatan dan biaya pendidikan serta pemerataannya. Ada 6 faktor yang menyebabkan pelaksanaan otonomi pendidikan belum jalan, yaitu 1) Belum jelas aturan permainan tentang peran dan tata kerja di tingkat kabupaten dan kota 2) Pengelolaan sektor publik termasuk pengelolaan pendidikan yang belum siap untuk dilaksankana secara otonom karena SDM yang terbatas serta fasilitas yang tidak memadai. 3) Dana pendidikan dan APBD belum memadai. 4) Kurangnya perhatian pemerintah maupun pemerintah daerah untuk lebih melibatkan masyarakat dalam pengelolaan pendidikan. 5) Otoritas pimpinan dalam hal ini Bupati, Walikota sebagai penguasa tunggal di daerah kurang memperhatikan dengan sungguh-sungguh kondisi pendidikan di daerahnya sehingga anggaran pendidikan belum menjadi prioritas utama. 6) Kondisi dan setiap daerah tidak memiliki kekuatan yang sama dalam penyelenggaraan pendidikan disebabkan perbedaan sarana, prasarana dan dana yang dimiliki. Hal ini mengakibatkan akan terjadinya kesenjangan antar daerah, sehingga pemerintah perlu membuat aturan dalam penentuan standar mutu pendidikan nasional dengan memperhatikan kondisi perkembangan kemandirian masing-masing daerah. Perdebatan tentang otonomi daerah hanya berkisar pada perebutan kekuasaan antara pusat dan daerah.Selain itu, tidak produktifnya perdebatan tentang otonomi ini juga berbuntut pada tidak efektifnya pelaksanaannya dalam semua aspek termasuk dalam bidang pendidikan. Perspektif baru kali ini akan mencoba berbicara mengenai persoalan otonomi ini dengan titik berat pada manfaatnya buat pengembangan pendidikan di daerah. Barangkali kita sepakat bahwa pada awalnya kita menaruh harapan yang sangat besar tentang otonomi daerah karena kita berasumsi keterpurukan ekonomi kita termasuk bidang-bidang yang lainnya itu adalah disebabkan oleh sistem pemerintahan yang sangat sentralistik. Sehingga secara sangat sederhana kita mengasumsikan kalau sistemnya dirubah dari sentralistik menjadi desentralistik lalu semuanya menjadi lancar. Kemudian juga kita berpikir pada waktu itu sistem pemerintahaan yang otoriter kalau diganti demokratis maka semua juga akan lancar. Ternyata asumsi demikian di lapangan tidak terjadi.Justru kita banyak mengalami kekecewaan.Dalam pelaksanaan otonomi daerah karena yang dibayangkan sebelumnya adalah perbaikan ternyata yang muncul itu justru banyak hal-hal yang memperumit situasi. Katakanlah bahwa setiap kabupaten dan kota itu misalnya sangat mementingkan daerah sendiri atau ego kedaerahannya sangat tinggi, tidak adanya lagi kontrol yang begitu efektif dari provinsi ke daerah sehinga mereka masing-masing menjalankan kebijakan sendiri-sendiri di berbagai bidang seperti bidang ekonomi, bidang pembangunan sosial masyarakat dan lain-lain. Jadi banyak kalangan yang berpendapat bahwa sebenarnya penyerahan hak keotonomian dari pusat langsung ke tingkat kabupaten dan kota itu terlalu cepat.

Karena peran provinsi menjadi sangat tidak signifikan. Namun demikian kita serahkan kepada para politisi dan para pengamat politik, bagaimana sebenarnya ke depan. Sayangnya barangkali para gubernur merasa bahwa kewenangan yang mengkoordinasi dan kewenangan mengawasi itu barangkali dianggap tidak cukup sehingga kelihatanya para gubernur itu membiarkan saja para bupati dan walikota melakukan kebijakannya sendiri-sendiri, terlepas daripada keterkaitan dengan kabupaten dan kota yang lainnya.

Dilaksanakannnya otonomi pendidikan atau desentralisasi pendidikan, memiliki beberpa kekuatan atau kelebihan dan juga kekurarangan atau kelemahan. Apabila suatu daerah dapat menutupi kelemahan dari sistem desentralisasi ini maka pelaksanaan desentralisasi pendidikan akan mendapatkan hasil yang baik. Kekuatan kebijakan desentralisasi pendidikan adalah: a. Sudah merupakan kebijakan yang populis b. Mendapat dukungan yang kuat dari berbagai pihak, khususnya dari para wakil rakyat yang menduduki kursi DPR-RI. c. Sebagai hal yang telah lama di tungu-tungu menyusul adanya perubahan sosial politik. d. Kesiapan anggaran yang cukup dengan ditetapkannya anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN. e. Efisiensi perjalanan anggaran sebagai wujud pemangkasan birokrasi. Karena sudah merupakan kebijakan yang populis, desentralisasi pendidikan pasti di dukung oleh berbagai lapisan masyarakat, khususnya masyarakat pendidikan di daerah. Kekuatan lain yang juga amat mendukung bagi lahirnya kebijakan ini adalah dukungan dari pihak legeslatif. Kekuatanlainnya adalah kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk mengahadapi perubahan.Termasuk dalam hal ini adalah kesadaran masyarakat menyikapi desetralisasi pendidikan, anggota masyarakat amat di tuntut partisipasinya dalam menjalani perubahan tersebut.

Kekuatan yang tidak kalah pentingnya adalah dukungan dana anggaran pendidikan yang cukup tinggi di bandingkan anggaran sebelumnya yaitu kurang dari 4% kita berharap anggaran pendidikan yang di sepakati 20 % dari APBN di jadikan prioritas utama sebelum pengagaran bidang lainnya. Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan seiring dengan otonomi pendidikan sudah seharusnya dikembangkan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Secara prinsip, paradigma baru yang ingin dibangun dan serangkaian pembahasan ini adalah: Pengeloaan Pendidikan Berbasis Sekolah.Pada kerangka otonomi pendidikan, sekolah merupakan pilar utama dan terdepan untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara komprehensif. Telah disadari bersama bahwa upaya mewujudkan sekolah yang mandiri dan kreatif tidak akan pernah terwujud tanpa adanya pemberian kepercayaan yang penuh bagi sekolah itu agar dapat mengaktualisasikan potensinya. Untuk itu, sekolah beserta seluruh perangkatnya segera bangkit menuju kemandirian dan senantiasa kreatif dalam melakukan setiap aktivitas. Ada

beberapa kalangan pemerhati yang khawatir bahwa desentralisasi pendidikan akan menciptakan kesenjangan yang semakin antara kelompok perserta didik yang kaya dengan kelompok peserta didik yang miskin .Bahkan banyak juga mengungkapkan kekhawatirannya, bahwa desentralisasi pendidikan hanyalah memindahkan penyakit kronis pendidikan dari tingkat pusat ke daerah.Apapun yang terjadi desentralisasi pendidikan guna menumbuhkan sikap demokratis,namun demikian desentralisasi pendidikan tidak akan ada artinya tanpadiikuti adanya usaha-usaha perbaikan pada banyak aspek. Proses desentralisasi pendidikan tampaknya adalah suatu proses yang rumit. Faktor-faktor yang menyebabkan desentralisasi pendidikan tampak rumit adalah: 1. Desentralisasi pendidikan akan menciptakan suatu sistem pendidikan dengan kebijakan-kebijakan yang konkrit; 2. Desentralisasi pendidikan juga harus mengelola sumberdaya dan pemanfaatannya; 3. Desentratisasi pendidikan juga harus metatih tenaga kependidikan dan tenaga pengelota tingkat lapangan yang profesional; 4. Desentralisasi pendidikan juga harus menyusun kurikulum yang tepat-guna; dan 5. Desentralisasi pendidikan juga mengelola sistem pendidikan yang didasarkan pada kebudayaan setempat. Adalah suatu gejala yang umum, bahwa jenjang dan jenis pendidikan dikotak-kotakkan sedemikian rupa, sehingga tampak satu sama lain tidaklah berhubungan. Pendidikan tinggi seolah-olah tidak berkaitan dengan pendidikan menengah.Demikian juga dengan pendidikan menengah tidak berhubungan dengan sebagian pendidikan dasar.Segmentasi jenis dan jenjang pendidikan ini tampaknya merupakan hasil dari sistem birokrasi dan sentratisasi pengelolaan pendidikan.

Dampak Yang ditimbulkan Otonomi Pendidikan Dan Upaya Pemecahannya

Desentralisasi pendidikan, merupakan salah satu cara di masa "pendidikan otoriter" tidak lagi dianut, atau dengan kata lain masa pendidikan di era otonomi daerah. Era yang dimulai secara formal melalui produk kebijakan otonomi pendidikan perguruan tinggi, kebijakan desentralisasi pendidikan yang mengacu pada UU No. 32 tahun 2004 dan No. 33 tahun 2004 dimana dapat ditangkap prinsip-prinsip dan arah baru dalam pengelolaan sektor pendidikan dengan mengacu pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.Ditengah ketatnya birokrasi pendidikan yang mengakibatkan rendahnya kualitas pendidikan ternyata telah menjadi bagian dari ketidakpuasan masyarakat, hal ini mendorong pemerintah (Legislatif dan Eksekutif) mengambil kebijakan politik mencari jalan keluar yang rasional sebagai upaya pemecahan untuk memtong birokrasi yang kaku dan sentralistik melalui suatu aturan perundang-undangan.

Implikasi otonomi daerah bagi sektor pendidikan sangat tergantung pada pembagian kewewenangan di bidang pendidikan yang akan ditangani pemerintah pusat dan pemerintah daerah disisi lain. Lalu sebuah sistem pendidikan nasional yang disahkan melalui UU Sisdiknas dimana beberapa muatan dalam kebijakan ini secara tidak langsung mencoba melakukan perbaikan mutu pendidikan.Untuk itulah partisipasi orang tua, masyarakat, dan guru sangat penting untuk mereformasi pendidikan ini, selain memecahkan masalah finansial melalui langkah-langkah yang diformulasi pemerintah baik pusat maupun daerah. Hak atas pendidikan melibatkan empat permainan kunci: pemerintah sebagai penyedia dan/atau pembiaya sekolah publik, sianak sebagai pemegang hak atas pendidik dan pemegang tugas untuk mengikuti ketentuan-ketentuan wajib belajar, orang tua si anak yang merupakan pendidik pertama, dan pendidik profesional yaitu para guru.

Berangkat dari ide otonomi pendidikan muncul beberapa konsep sebagai solusi dalam menghadapi kendala dalam pelaksanaan otonomi pendidikan, yaitu:

A. Meningkatkan Manajemen Pendidikan Sekolah Pada dasarnya kualitas pendidikan dapat ditinjau dari segi proses dan produk. Pendidikan disebut berkualitas dari segi proses jika proses belajar mengajar berlangsung secara efektif, dan peserta didik mengalami pembelajaran yang bermakna. Pendidikan disebut berkualitas dari segi produk jika mempunyai salah satu ciri-ciri sebagai berikut : a) peserta didik menunjukkan penguasaan yang tinggi terhadap tugas-tugas belajar (learning task) yang harus dikuasai dengan tujuan dan sasaran pendidikan, diantaranya hasil belajar akademik yang dinyatakan dalam prestasi belajar (kualitas internal); b) hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehingga dengan belajar peserta didik bukan hanya mengetahui sesuatu, tetapi dapat melakukan sesuatu yang fungsional dalam kehidupannya (learning and learning), c) hasil pendidikan sesuai atau relevan dengan tuntutan lingkungan khususnya dunia kerja. Menghadapi kondisi ini maka dilakukan pemantapan manajemen pendidikan yang bertumpu pada kompetensi guru dan kesejahteraannya.

B. Reformasi Lembaga Keuangan Hubungan Pusat-Daerah Perlu dilakukan penataan tentang hubungan keuangan antara Pusat-Daerah menyangkut pengelolaan pendapatan (revenue) dan penggunaannya (expenditure) untuk kepentingan pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah dalam rangka memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Sumber keuangan diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang syah dengan melakukan pemerataan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan kegiatan pada suatu daerah, terutama pada daerah miskin.Bila dimungkinkan dilakukan subsidi silang antara daerah yang kaya kepada daerah yang miskin, agar pemerataan pendidikan untuk mendapatkan kualitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

C. Kemauan Pemerintah Daerah Melakukan Perubahan Pada era otonom, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah. Bila pemerintah daerah memiliki political will yang baik dan kuat

terhadap dunia pendidikan, ada peluang yang cukup luas bahwa pendidikan di daerahnya akan maju. Sebaiknya, kepala daerah yang tidak memiliki visi yang baik di bidang pendidikan dapat dipastikan daerah itu akan mengalami stagnasi dan kemandegan menuju pemberdayaan masyarakat yang well educated dan tidak pernah mendapat momentum yang baik untuk berkembang. Otonomi pendidikan harus mendapat dukungan DPRD, karena DPRD-lah yang merupakan penentu kebijakan di tingkat daerah dalam rangka otonomi tersebut.Di bidang pendidikan, DPRD harus mempunyai peran yang kuat dalam membangun pradigma dan visi pendidikan di daerahnya.Oleh karena itu, badan legislatif harus diberdayakan dan memberdayakan diri agar mampu menjadi mitra yang baik. Kepala pemerintahan daerah, kota diberikan masukan secara sistematis dan membangun daerah.

D. Membangun Pendidikan Berbasis Masyarakat Kondisi Sumber Daya yang dimiliki setiap daerah tidak merata untuk seluruh Indonesia. Untuk itu, pemerintah daerah dapat melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, ilmuwan, pakar kampus maupun pakar yang dimiliki Pemerintah Daerah Kota sebagai Brain Trust atau Think Thank untuk turut membangun daerahnya, tidak hanya sebagai pengamat, pemerhati, pengecam kebijakan daerah. Sebaliknya, lembaga pendidikan juga harus membuka diri, lebih banyak mendengar opini publik, kinerjanya dan tentang tanggung jawabnya dalam turut serta memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat.E. Pengaturan Kebijakan Pendidikan antara Pusat dan Daerah Pemerintah Pusat tidak diperkenankan mencampuri urusan pendidikan daerah Pemerintah Pusat hanya diperbolehkan memberikan kebijakan-kebijakan bersifat nasional, seperti aspek mutu dan pemerataan.Pemerintah pusat menetapkan standard mutu.Jadi, pemerintah pusat hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator bukan regulator. Otonomi pengelolaan pendidikan berada pada tingkat sekolah, oleh karena itu lembaga pemerintah harus memberi pelayanan dan mendukung proses pendidikan agar berjalan efektif dan efisien.

Kesimpulan

Desentralisasi pendidikan memberikan apresiasi terhadap perbedaan kemampuan dan keberanekaragaman kondisi daerah dan rakyatnya.Perubahan paradigma sistem pendidikan membutuhkan masa transisi.Reformasi pendidikan merupakan realitas yang harus dilaksanakan, sehingga diharapkan para pelaku maupun penyelenggara pendidikan harus proaktif, kritis dan mau berubah.Belajar dari pengalaman sebelumnya yang sentralistik dan kurang demokratis membuat bangsa ini menjadi terpuruk. Marilah kita melihat kepentingan bangsa dalam arti luas dari pada kepentingan pribadi atau golongan atau kepentingan pemerintah pusat semata dengan menyelenggarakan otonomi pendidikan sepenuh hati dan konsisten dalam rangka mengangkat harkat dan martabat bangsa dan masyarakat yang berbudaya dan berdaya saing tinggi sehingga bangsa ini duduk sejajar dengan bangsa-bangsa maju di dunia.Otonomi pendidikan pada kerangka otonomi daerah membawa konsekunsi yang cukup dilematis di kalangan persekolahan. Pada satu sisi lembaga pendidikan harus mandiri dalam mewujudkan kualitasnya, pada sisi lain lembaga pendidikan masih banyak memiliki kekurangan (pendukung). Namun demikian, pada era otonomi pendidikan, sekolah harus mampu berkompetisi dengan lembaga pendidikan lain dalam hal peningkatan kualitas lulusannya.

DAFTAR PUSTAKA

Soedijarto, Landasan Dan Arah Pendidikan Nasional Kita, Wajib Belajar Dan Peran Negara Empat Pilar Arah Kurikulum, Ujian Nsional, Profesionalitas Guru, Anggaran Pendidikan, Akreditasi Nasioan. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara,2008

Tilaar,H.A.R,Paradigma Baru Pendidikan Nasional Jakarta: Rineka Cipta,2004.

Tilaar,H.A.R,Manajemen Pendidikan Nasional Bandung:Rosdakarya Cipta,2004.

Tomasevski,Pendidikan Yang Terabaikan, Masalah Dan Penyelesainnya, Jakarta: Departemen Hukum Dan HAM,2004.

Wahyudi Kusmorotomo dan Agus Pramusinto,Governance Reform di Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokrtais Dan Birokrasi Yang Profesional, Yogyakarta: Gava Media, 2009.

Dewey,John. Democracy And Education. New York: The Mc Millan Company. 1964.